

Analisis Kesiapan Digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju *Smart Village*

Muhtar¹, Rukoyah² Yustina Sopacua³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura,
Ambon, Indonesia^{1,2}

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura,
Ambon, Indonesia³

*Email Korespondensi: muhtar@lecturer.unpatti.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 10-05-2026
Disetujui 16-05-2026
Diterbitkan 18-05-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the digital readiness of the Negeri Batu Merah Government in Ambon City in supporting the implementation of a smart village. The study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of village government officials, administrative staff, and community members as users of public services. The results showed that the Negeri Batu Merah Government has begun implementing administrative digitalization through the use of computers, digital communication media, and electronic archive management in public services. The government's digital readiness is supported by the commitment of local authorities, the availability of basic technological facilities, and the increasing public demand for fast and effective services. However, the implementation of government digitalization still faces several challenges, including limited internet infrastructure, low human resource capacity among government officials, budget constraints, and limited digital literacy within the community. This study concludes that the development of a smart village in Negeri Batu Merah requires strengthening digital infrastructure, improving the competencies of government officials, and increasing community participation to ensure that digital transformation can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: *smart village; digital transformation; local governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon dalam mendukung implementasi *smart village*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur pemerintahan negeri, staf administrasi, dan masyarakat pengguna layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Negeri Batu Merah telah mulai menerapkan digitalisasi administrasi melalui penggunaan komputer, media komunikasi digital, dan pengelolaan arsip elektronik dalam pelayanan publik. Kesiapan digital pemerintahan didukung oleh adanya komitmen pemerintah negeri, ketersediaan perangkat teknologi dasar, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan efektif. Namun demikian, implementasi digitalisasi pemerintahan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, keterbatasan anggaran, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan *smart village* di Negeri Batu Merah memerlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan

kompetensi aparatur pemerintahan, serta dukungan partisipasi masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan..

Katakunci: smart village; transformasi digital; pemerintahan negeri

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhtar, Rukoyah, R., & Sopacua, Y. . (2026). Analisis Kesiapan Digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju Smart Village. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4510-4519. <https://doi.org/10.63822/j4myk447>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pemerintahan. Transformasi digital pada sektor pemerintahan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, transparansi tata kelola, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks pemerintahan lokal, digitalisasi desa atau negeri menjadi bagian penting dalam mewujudkan konsep *smart village* sebagai bentuk pengembangan desa berbasis teknologi dan inovasi pelayanan publik.

Konsep *smart village* berkembang sebagai adaptasi dari konsep *smart city* yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui tata kelola pemerintahan yang cerdas, pelayanan publik yang efektif, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (Visvizi & Lytras, 2018). Implementasi *smart village* tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi digital, tetapi juga mencakup kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa.

Di Indonesia, pemerintah terus mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan tersebut menjadi landasan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis digital di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pemerintahan desa dan pemerintahan negeri. Digitalisasi pemerintahan desa dipandang penting karena desa merupakan unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelayanan administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon merupakan salah satu wilayah pemerintahan negeri yang memiliki aktivitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang cukup kompleks. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, Negeri Batu Merah menghadapi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Kondisi tersebut mendorong perlunya penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri sebagai langkah menuju *smart village*.

Namun demikian, implementasi digitalisasi pemerintahan di Negeri Batu Merah masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan, belum optimalnya sistem pelayanan digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi kendala dalam pengembangan pemerintahan berbasis teknologi. Selain itu, sebagian besar pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga proses pelayanan publik belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesiapan digital menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi *smart village*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Pratama (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan desa dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi aparatur desa, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian lain oleh Sari et al. (2022) menemukan bahwa penerapan *smart village* mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, penelitian oleh Nugroho dan Widodo (2020) menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan desa memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi dan transparansi tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada desa administratif di wilayah perkotaan atau daerah maju yang telah memiliki dukungan infrastruktur teknologi yang relatif baik. Penelitian mengenai kesiapan digital pemerintahan negeri berbasis adat di wilayah

Maluku, khususnya Negeri Batu Merah Kota Ambon, masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik pemerintahan negeri di Maluku memiliki struktur sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan desa administratif pada umumnya sehingga memerlukan pendekatan tersendiri dalam pengembangan *smart village*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji kesiapan digital pemerintahan negeri berbasis adat menuju implementasi *smart village* di Kota Ambon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju *smart village*?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah?
3. Bagaimana strategi pengembangan digitalisasi pemerintahan Negeri Batu Merah dalam mendukung implementasi *smart village*?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju *smart village*, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat digitalisasi pemerintahan, serta merumuskan strategi pengembangan pemerintahan berbasis digital yang efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *digital governance* dan *smart village*, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transformasi digital pemerintahan negeri di Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tingkat kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju implementasi *smart village*, termasuk berbagai faktor pendukung, hambatan, dan strategi pengembangan digitalisasi pemerintahan yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objektif transformasi digital pemerintahan negeri secara sistematis dan komprehensif.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa Negeri Batu Merah merupakan salah satu wilayah pemerintahan negeri dengan jumlah penduduk yang besar, aktivitas pelayanan publik yang kompleks, serta memiliki kebutuhan tinggi terhadap pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian yang terdiri atas aparatur pemerintahan negeri, staf administrasi pelayanan publik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan negeri.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah, laporan administrasi pemerintahan, profil Negeri Batu Merah, data pelayanan publik, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), jurnal ilmiah, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintahan desa dan konsep *smart village*. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen penelitian sebelumnya mengenai tata kelola pemerintahan Negeri Batu Merah sebagai data pendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan administrasi pemerintahan, penggunaan perangkat teknologi informasi, serta aktivitas pelayanan publik berbasis digital di kantor pemerintahan negeri. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai kesiapan digital pemerintahan, hambatan implementasi teknologi, dan strategi pengembangan *smart village*. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti struktur organisasi pemerintahan, data penggunaan teknologi informasi, arsip pelayanan administrasi, foto kegiatan pelayanan publik, dan dokumen kebijakan pemerintahan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), sedangkan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera dokumentasi, laptop, dan catatan lapangan. Peneliti berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data sehingga diperlukan kemampuan analisis yang objektif dan sistematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan bagan agar mempermudah proses interpretasi data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan informan sebelum wawancara dilakukan, serta menggunakan seluruh data penelitian hanya untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan

HASIL DAN PEMBAHASA

1. Kondisi Umum Digitalisasi Pemerintahan Negeri Batu Merah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Pemerintahan Negeri Batu Merah untuk mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis digital dalam aktivitas administrasi pemerintahan. Upaya digitalisasi dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan transparan. Dalam praktiknya, Pemerintahan Negeri Batu Merah telah memanfaatkan perangkat komputer, jaringan internet, media komunikasi digital, serta aplikasi administrasi sederhana dalam mendukung pelayanan masyarakat.

Penerapan digitalisasi pemerintahan terlihat pada proses administrasi surat menyurat, pengelolaan data kependudukan, penyampaian informasi publik melalui media sosial, serta komunikasi pelayanan masyarakat menggunakan aplikasi pesan digital seperti WhatsApp. Kehadiran teknologi digital tersebut membantu aparatur pemerintahan dalam mempercepat proses pelayanan dan mempermudah pengelolaan administrasi pemerintahan.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi pemerintahan di Negeri Batu Merah masih berada

pada tahap awal pengembangan. Sebagian besar pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga proses pelayanan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan digital pemerintahan negeri menuju *smart village* masih membutuhkan penguatan pada berbagai aspek.

2. Tingkat Kesiapan Digital Pemerintahan Negeri Batu Merah

Kesiapan digital pemerintahan Negeri Batu Merah dianalisis berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, sistem pelayanan digital, serta partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital.

a Kesiapan Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi menjadi komponen utama dalam mendukung implementasi *smart village*. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintahan Negeri Batu Merah telah memiliki fasilitas dasar berupa komputer, printer, jaringan internet, dan perangkat komunikasi digital yang digunakan dalam pelayanan administrasi pemerintahan.

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Digital Pemerintahan Negeri Batu Merah

Infrastruktur Digital	Kondisi
Komputer administrasi	Tersedia
Jaringan internet	Tersedia namun belum stabil
Media komunikasi digital	Digunakan
Sistem pelayanan online	Belum terintegrasi penuh
Arsip digital	Sebagian telah diterapkan

(Sumber: Hasil Penelitian, 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kesiapan infrastruktur digital di Negeri Batu Merah sudah mulai berkembang, namun belum optimal. Permasalahan utama terletak pada kualitas jaringan internet yang belum stabil serta belum adanya sistem pelayanan online yang terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan pelayanan digital belum dapat berjalan secara maksimal.

b Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintahan menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital menuju *smart village*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian aparatur pemerintahan telah memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi informasi seperti pengoperasian komputer dan penggunaan aplikasi administrasi digital.

Namun demikian, kemampuan aparatur dalam pengelolaan sistem digital masih belum merata. Beberapa aparatur pemerintahan masih mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi pelayanan digital dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pelatihan dan minimnya pengembangan kompetensi digital aparatur pemerintahan.

Tabel 2. Tingkat Kesiapan SDM Aparatur Pemerintahan

Aspek SDM Digital	Kondisi
Kemampuan dasar komputer	Cukup baik
Penggunaan aplikasi digital	Belum optimal
Pelatihan teknologi informasi	Masih terbatas
Literasi digital aparatur	Sedang berkembang

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan utama dalam mendukung implementasi pemerintahan berbasis digital di Negeri Batu Merah.

3. Faktor Pendukung Kesiapan Digital menuju Smart Village

Pelaksanaan transformasi digital di Negeri Batu Merah didukung oleh beberapa faktor yang mendorong pengembangan pemerintahan berbasis teknologi.

Salah satu faktor utama adalah adanya komitmen pemerintah negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah negeri mulai menyadari pentingnya digitalisasi sebagai langkah strategis dalam menghadapi perkembangan pelayanan publik modern.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan cepat dan praktis juga menjadi faktor pendukung transformasi digital. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan teknologi komunikasi digital sehingga mendorong pemerintah negeri untuk meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya perangkat teknologi dasar seperti komputer dan akses internet yang dapat digunakan dalam mendukung administrasi pemerintahan. Dukungan komunikasi digital melalui media sosial juga membantu penyebaran informasi publik secara lebih cepat dan luas.

4. Faktor Penghambat Kesiapan Digital Pemerintahan Negeri

Meskipun memiliki potensi pengembangan menuju *smart village*, Pemerintahan Negeri Batu Merah masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasi digitalisasi pemerintahan.

Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, khususnya kualitas jaringan internet yang belum stabil. Kondisi tersebut menghambat pelaksanaan pelayanan berbasis digital dan memperlambat proses administrasi pemerintahan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan juga menjadi kendala dalam pengoperasian sistem digital secara optimal. Sebagian aparatur masih memerlukan pelatihan teknologi informasi agar mampu mengelola pelayanan digital dengan lebih efektif.

Tabel 3. Faktor Penghambat Kesiapan Digital Pemerintahan

Faktor Penghambat	Dampak
Jaringan internet belum stabil	Pelayanan digital terganggu
SDM aparatur terbatas	Pengelolaan sistem belum optimal
Keterbatasan anggaran	Pengembangan teknologi terhambat
Literasi digital masyarakat rendah	Pemanfaatan layanan digital belum maksimal

Selain faktor internal pemerintahan, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat juga menjadi tantangan dalam implementasi *smart village*. Sebagian masyarakat masih lebih memilih pelayanan administrasi secara langsung dibandingkan menggunakan layanan berbasis digital.

5. Strategi Pengembangan Smart Village di Negeri Batu Merah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju *smart village*.

Pertama, pemerintah negeri perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi, terutama penguatan jaringan internet dan pengembangan sistem pelayanan administrasi berbasis digital yang terintegrasi. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan melalui pelatihan teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah negeri perlu meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi penggunaan layanan digital agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis teknologi. Keempat, diperlukan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan transformasi digital pemerintahan negeri secara berkelanjutan.

Gambar 1. Strategi Pengembangan Smart Village di Negeri Batu Merah



(Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Negeri Batu Merah memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang menuju *smart village*. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital memerlukan kesiapan yang menyeluruh baik dari aspek teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun partisipasi masyarakat sehingga implementasi pemerintahan berbasis digital dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat.

KESIMPULAN

Kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah menuju implementasi *smart village*

menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah negeri telah mulai menerapkan digitalisasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penggunaan perangkat teknologi informasi, pengelolaan data berbasis komputer, serta pemanfaatan media komunikasi digital dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah negeri dalam mendukung modernisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan digital Pemerintahan Negeri Batu Merah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain ketersediaan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan, sistem pelayanan digital, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan berbasis teknologi. Keberadaan perangkat digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan cepat menjadi faktor pendukung pengembangan *smart village*. Namun demikian, keterbatasan kualitas jaringan internet, rendahnya kompetensi digital aparatur, keterbatasan anggaran, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam implementasi digitalisasi pemerintahan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan *smart village* di Negeri Batu Merah memerlukan strategi yang terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur digital, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, pengembangan sistem pelayanan administrasi berbasis digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, transformasi digital pemerintahan negeri diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Negeri Batu Merah Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Arifin, M., & Putra, D. (2021). Digital governance dalam pengembangan smart village di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 112–125. <https://doi.org/10.24905/jip.v14i2.2456>
- Hardjaloka, L. (2019). Studi penerapan e-government di Indonesia sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 435–452. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi digital*. Andi Publisher.
- Kurniawan, T., & Prasetyo, A. G. (2021). Digital transformation of village governance toward smart village implementation. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 115–128. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.89>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, D., & Gedeona, H. T. (2020). Transformasi digital birokrasi desa menuju pelayanan publik berbasis elektronik. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 401–416. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.676>
- Nugroho, R., & Widodo, S. (2020). Implementasi e-government dalam mendukung pelayanan administrasi desa berbasis digital. *Jurnal Governance*, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.31506/jog.v11i2.2211>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Pratama, A. B. (2020). The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis. *Innovation & Management Review*, 17(1), 25–40. <https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080>
- Rahman, A., & Pratama, Y. (2021). Kesiapan digital pemerintahan desa menuju smart village di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 301–315. <https://doi.org/10.23887/jish.v10i3.41256>
- Sari, N., Wijaya, H., & Lestari, P. (2022). Implementasi smart village dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 56–69. <https://doi.org/10.25077/jakp.7.1.56-69.2022>
- Setiawan, D., & Sulistyono, B. (2021). Transformasi digital pemerintahan desa menuju smart village berbasis pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1), 88–102. <https://doi.org/10.33509/jan.v27i1.1145>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations. (2022). *E-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations Publications. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2022>
- Visvizi, A., & Lytras, M. D. (2018). It's not a fad: Smart cities and smart villages research in European and global contexts. *Sustainability*, 10(8), 2727. <https://doi.org/10.3390/su10082727>
- Yusuf, M., & Kurnia, R. (2023). Inovasi pelayanan publik berbasis digital pada pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.59876>